

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu komitmen global yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil memastikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu tujuannya adalah mengatasi perubahan iklim melalui tindakan cepat untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang mengatur pencapaiannya. Kementerian PPN/Bappenas juga telah menyusun peta jalan yang memuat isu dan proyeksi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang berperan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan.

Fokus utama Indonesia mencakup isu-isu yang relevan, termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta infrastruktur dasar seperti air, sanitasi, telekomunikasi, dan energi terbarukan, layanan ekosistem, biodiversitas, dan tata kelola pemerintahan. Implementasi SDGs dirancang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, parlemen, pelaku usaha, filantropi, akademisi, organisasi masyarakat, dan media. Pendekatan ini juga secara inklusif menargetkan kelompok rentan agar

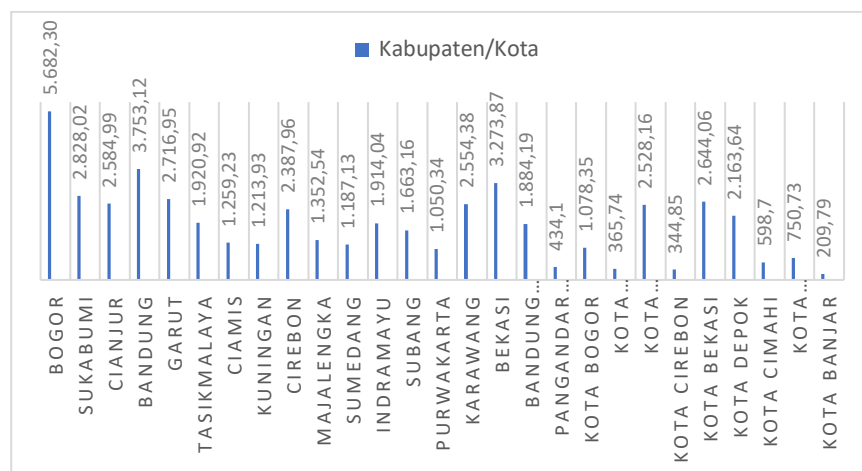
lebih banyak pihak dapat dilibatkan dalam pencapaian tujuan SDGs (Unggul, 2024).

Masyarakat terus mengalami perkembangan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, baik untuk kesejahteraan saat ini maupun demi keberlanjutan di masa yang akan datang, namun pertumbuhan ini membutuhkan dukungan dari lingkungan yang sehat. Salah satu faktor kualitas lingkungan adalah pengelolaan sampah. Sampah telah menjadi permasalahan yang inheren dalam aktivitas masyarakat, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Aktivitas masyarakat yang semakin intensif, terutama di kawasan urban, hal ini mengakibatkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan, menjadikan kota-kota rentan terhadap isu lingkungan seperti sampah. Di kawasan urban dengan pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan fasilitas pendukung lainnya yang pesat, juga mengalami peningkatan jumlah penduduk.

Pertumbuhan berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk yang berkontribusi pada bertambahnya volume sampah. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab utama yang harus diperhatikan, terutama di kawasan permukiman yang merupakan salah satu sumber utama sampah. Pengelolaan sampah di wilayah permukiman perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah agar hasilnya optimal. Ketidakefektifan dalam mengendalikan pertumbuhan populasi, yang kerap mendorong urbanisasi, mengakibatkan berbagai permasalahan, termasuk di Indonesia (Muladi, 2022).

Urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk perkotaan juga meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, pada akhirnya mendorong peningkatan produksi sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, fenomena ini dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, termasuk pencemaran yang membahayakan keberlanjutan kehidupan di perkotaan. Permasalahan sampah semakin sulit diatasi karena meningkatnya kebutuhan hidup tidak diimbangi Dengan adanya pengetahuan, tindakan, dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti melalui kebiasaan membuang sampah pada tempat yang semestinya. Dengan bertambahnya populasi, tingkat pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan, yang mendorong pola konsumsi lebih tinggi dan berujung pada peningkatan produksi sampah. Kondisi ini menjadi tantangan besar karena pengelolaan sampah yang masih terbatas dan kurang optimal, menyebabkan banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik dan berserakan.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2024



Sumber : BPS

Kota Bogor menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah. Dengan setiap individu menghasilkan sampah, penambahan jumlah penduduk secara langsung meningkatkan volume sampah yang dihasilkan. Sebagai bagian dari kawasan metropolitan, Kota Bogor kerap mengalami lonjakan jumlah sampah seiring bertambahnya populasi dan urbanisasi. Data menunjukkan perlunya Kota Bogor untuk segera merancang sistem manajemen sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya, seperti Kota Depok yang memiliki 2.163,64 ribu jiwa dan Kota Bekasi dengan 2.644,06 ribu jiwa, pentingnya kolaborasi antarwilayah menjadi semakin jelas.

Kolaborasi dalam penanganan sampah ini dapat mencakup pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah bersama, program edukasi masyarakat, serta penerapan teknologi untuk mengurangi dan mengolah sampah. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan populasi perlu diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan. Upaya pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah harus menjadi prioritas utama di Kota Bogor guna menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan bagi warganya.

Kota Bogor merupakan salah satu wilayah urban di Provinsi Jawa Barat yang terletak di dekat Daerah Khusus Jakarta dan terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor, menjadikannya pusat dari Wilayah Bogor. Kota ini mencakup area seluas 118,50 km² dengan populasi mencapai 1.032.375 jiwa. Secara administratif, Kota Bogor terbagi menjadi enam kecamatan dan 68

kelurahan sebagai unit administratif. Sebagai wilayah yang berada dalam kedekatan geografis dengan Jakarta, Kota Bogor mengalami pesatnya urbanisasi yang membuat masyarakatnya kini terdiri dari beragam suku dan budaya, meskipun suku asli kota ini adalah Sunda. Urbanisasi dari daerah pedesaan ke perkotaan membawa berbagai dampak sosial, seperti masalah sosial ekonomi, transportasi, budaya, serta berbagai persoalan lainnya bagi masyarakat setempat (Basri, 2023).

Tabel 1. 2 Data Persentase Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

Sumber Sampah	Persentase
Rumah Tangga	62,44%
Perniagaan	19,48%
Fasilitas Publik	6,17%
Pasar	4,89%
Perkantoran	3,25%
Kawasan	2,84%
Lainnya	0,93%
Total	100%

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Data mengenai sumber sampah di Kota Bogor menunjukkan bahwa rumah tangga menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi mencapai 62,44% dari total timbulan sampah. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas domestik merupakan sumber utama produksi sampah di kota ini. Data ini memiliki kaitan erat dengan strategi pengelolaan sampah di Kota Bogor. Mengingat sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, program edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat harus difokuskan pada pengurangan dan pemilahan sampah di tingkat individu. Langkah-langkah ini dapat mencakup

pelatihan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mempromosikan penggunaan bahan ramah lingkungan.

Di sisi lain, sektor perniagaan juga memerlukan perhatian khusus untuk memastikan implementasi manajemen sampah yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Implementasi sistem pengelolaan sampah yang terpadu, termasuk kerjasama dengan pasar dan perkantoran, dapat berkontribusi dalam mengurangi volume sampah yang dialokasikan ke tempat pembuangan akhir. Dengan memahami sumber utama timbulan sampah, kolaborasi antara pemerintah Kota Bogor, swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan penanganan sampah yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kota Bogor pernah menghadapi krisis pengelolaan sampah ketika ratusan petani memblokir akses ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, yang berlokasi di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Masalah ini muncul karena Kota Bogor memiliki keterbatasan lahan untuk fasilitas umum, termasuk lokasi yang layak sebagai TPA. Akibatnya, Kota Bogor bergantung pada Kabupaten Bogor untuk menggunakan TPA Galuga. Resistensi masyarakat sekitar TPA, yang semakin sadar akan dampak kesehatan dan lingkungan, kerap menimbulkan penolakan terhadap keberadaan TPA di dekat permukiman mereka. Sejalan dengan dinamika perkotaan dan peningkatan populasi, volume sampah di Kota Bogor terus mengalami eskalasi (Ramdhan, 2022).

Pada tahun 2024, rata-rata timbulan sampah mencapai 779.81 ton per hari, naik dari 744.46 ton pada tahun 2022. Pengelolaan sampah masih mengandalkan metode konvensional seperti kumpul, angkut, dan buang, dengan TPA Galuga sebagai lokasi utama. Hingga saat ini, rencana pembangunan tempat pengolahan sampah regional di Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum terealisasi (SIPSN).

Gambar 1. 1 Gunung Sampah TPA Galuga



Sumber : Tempo.co diakses 20 November 2024

Gambar di atas merupakan pengelolaan sampah di Kota Bogor mencerminkan berbagai tantangan dalam menangani timbulan sampah yang terus bertambah. Tumpukan sampah yang besar mengindikasikan bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan berbagai sektor belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merumuskan strategi manajemen sampah rumah tangga yang lebih efisien.

Edukasi masyarakat tentang pemilahan dan pengurangan sampah kertas, botol, serta bahan organik melalui prinsip *reuse, reduce, dan recycle* merupakan langkah penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas daur ulang, sangat penting untuk mengurangi tekanan pada tempat pembuangan akhir (TPA) dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Bogor.

Tabel 1. 3 Data Sampah Terangkut, Tidak Terangkut, Dan Timbulan Sampah Kota Bogor

Manajemen Sampah	2021	2022	2023	2024
Sampah Terangkut	206.164	195.786	185.191	272.672
Timbulan Sampah	245.992	245.992	240.205	284.631
Sampah tidak terangkut	39.758	50.136	55.014	69.312
Persentase Sampah Terangkut	83.67%	79.64%	77.05%	95.78%
Persentase Sampah Tidak Terangkut	16.12%	20.36%	22.91%	24.40%

Sumber : SIPSN dan DLH Kota Bogor

Data pengelolaan sampah di Kota Bogor menunjukkan tantangan signifikan dalam sistem yang ada. Tabel menunjukkan data manajemen sampah dari tahun 2021 hingga 2024, dengan tren penurunan jumlah sampah yang terangkut dari 206.164 ton pada 2021 menjadi 185.191 ton pada 2023, sebelum meningkat tajam menjadi 272.672 ton pada 2024. Timbulan sampah cenderung stabil hingga 2023, tetapi meningkat signifikan pada 2024. Persentase sampah

yang tidak terangkut juga naik dari 16,12% pada 2021 menjadi 24,40% pada 2024, meskipun jumlah sampah yang terangkut meningkat pada 2024, jumlah sampah yang tidak terangkut juga mengalami kenaikan.

Salah satu faktor meningkatkan sampah yang tidak terangkut yaitu keterbatasan infrastruktur, armada pengangkut yang tidak memadai. Sebanyak 133 unit armada pengangkut sampah milik DLH Kota Bogor dalam kondisi memprihatinkan, dengan 80 persen kendaraan berusia lebih dari 10 tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengurangan sampah. Untuk mengatasi hal ini, Kota Bogor perlu meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, menambah frekuensi pengangkutan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan sistem manajemen sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga mampu mengurangi jumlah sampah yang tidak terangkut dan memperbaiki kualitas lingkungan kota. (Taufik, 2022).

Kebijakan penanganan sampah di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga sistem pengangkutan dan pembuangan sampah yang terintegrasi. Pendekatan utama yang diusung dalam peraturan ini adalah

pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk menekan jumlah sampah yang terakumulasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta meningkatkan tingkat daur ulang.

Peraturan daerah ini juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif komunitas masyarakat dan sektor bisnis dalam manajemen sampah melalui program edukasi maupun kampanye kesadaran lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur, fasilitas, dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif, sekaligus mengatur sanksi bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini, Kota Bogor diharapkan dapat menghadapi tantangan dalam implementasi manajemen sampah yang lebih sistematis, efektif, dan berkelanjutan.

Pemerintah memegang peran strategis dalam manajemen sampah sangat penting dan mencakup berbagai aspek yang saling mendukung untuk menciptakan sistem yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk aturan mengenai pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Pemerintah harus menyediakan dan memelihara infrastruktur seperti tempat pembuangan akhir dan fasilitas daur ulang agar sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah dapat berfungsi dengan baik. Edukasi masyarakat juga menjadi prioritas tentang pentingnya pemilahan dan pengurangan sampah melalui kampanye dan program edukasi. Pengawasan dan penegakan hukum

atas pelanggaran pengelolaan sampah juga krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. (Fitri, 2020).

Peran sektor swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Bogor sangat vital dan berkontribusi besar terhadap efisiensi sistem yang ada. Perusahaan swasta yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor yaitu, PT Waste 4 Change yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan melalui optimalisasi TPS 3R dan bank sampah. Sektor swasta turut berperan dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat melalui program edukasi dan kampanye yang mendorong pemilahan sampah serta penggunaan kembali barang (Saepudin, 2024).

Masyarakat berperan dalam pengurangan sampah dengan memanfaatkan bahan yang dapat dimanfaatkan kembali, mengalami proses daur ulang, atau terdegradasi secara alami. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bogor sangatlah penting, karena kesadaran dan partisipasi aktif warga menjadi faktor utama dalam mewujudkan lingkungan yang *higienis* dan berkelanjutan. Sebagai sumber utama pengurangan sampah, masyarakat dapat memulai dari pemilahan sampah pada level rumah tangga, seperti melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Seharusnya optimalisasi manajemen sampah di Kota Bogor memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat setempat, tetapi dalam praktiknya mereka bekerja sendiri-sendiri dan cenderung kurang terintegrasi (Hutagaol, 2020).

Eskalasi volume sampah yang tidak disertai dengan perbaikan maupun penambahan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah telah mengakibatkan permasalahan sampah semakin kompleks. Konsekuensinya mencakup akumulasi sampah yang tidak terangkut serta praktik pembuangan yang tidak terkontrol, hingga potensi penyebaran penyakit dan bau tidak sedap. Masalah sampah rumah tangga, yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, masih sering terlihat terutama disebabkan oleh masih maraknya praktik pembuangan sampah yang tidak teratur di kalangan masyarakat. Faktor utama yang melatarbelakanginya adalah rendahnya pemahaman mengenai tata kelola sampah rumah tangga yang efektif dan sesuai standar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan melalui dua pendekatan utama, meliputi aspek reduksi dan pengelolaan sampah. Reduksi sampah mencakup pembatasan volume sampah yang dihasilkan, pemanfaatan kembali, serta proses daur ulang sampah. Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam pengelolaan sampah secara terpadu, dimulai dari tingkat rumah tangga, RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan, kemudian diperluas ke skala yang lebih besar. Program pengelolaan sampah mandiri berbasis partisipasi masyarakat menjadi strategi yang efektif, terutama mengingat pertumbuhan produk pertanian, industri, dan lainnya yang turut meningkatkan volume dan jenis sampah.

Pendekatan pengelolaan sampah tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan seperti mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah, tetapi juga harus mencakup upaya pengurangan sampah. Perubahan pola pikir ini menekankan pentingnya pengelolaan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Dalam aspek reduksi, sampah yang telah terpilah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti sumber energi, bahan baku industri, kompos, atau pupuk. (Rizky, 2024).

Pengelolaan sampah di TPA Galuga masih kurang optimal karena seluruh kategori sampah, baik organik maupun anorganik, tercampur tanpa melalui proses pemilahan berdasarkan karakteristiknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di permukiman belum sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah di wilayah permukiman, diperlukan upaya untuk mengolah sampah agar memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. Hal ini hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan komunitas masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan permukiman (Zulkifli, 2024).

Pengelolaan sampah di Kota Bogor masih menerapkan metode tradisional, yaitu sampah diakumulasi pada beberapa lokasi pengumpulan sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). Dari total sampah yang dihasilkan di Kota Bogor, sekitar 73% merupakan sampah organik, sedangkan 27% bersifat anorganik. Namun, hanya sekitar 69,8% dari jumlah sampah tersebut yang berhasil diangkut ke TPA, disebabkan oleh keterbatasan armada

truk pengangkut sampah. Akibatnya, sebagian sampah yang tidak terangkut sering dibuang oleh masyarakat ke sungai atau lahan kosong. Hingga kini, Kota Bogor tidak memiliki TPA di dalam wilayah administratifnya sendiri. Sampah Kota Bogor dibuang ke TPA Galuga, yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan luas 9,7 hektar, TPA Galuga mampu menampung sekitar 1.325 m³ sampah per hari.

Kota Bogor menghadapi berbagai tantangan serius dalam penanganan sampah, yang diperburuk oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan aktivitas industri. Saat ini, hanya sekitar 70% dari total sampah yang dihasilkan dapat ditransportasikan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara residu sering dibuang sembarangan, menyebabkan pencemaran lingkungan. Keterbatasan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang kurang memadai, kurangnya TPA yang memadai yang memperparah kolaborasi penanganan sampah di Kota Bogor. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah melalui prinsip *reuse, reduce, dan recycle* yang efektif serta minimnya partisipasi dalam program reduksi dan pemilahan sampah semakin memperumit upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Dinamika kolaborasi dalam penanganan sampah di Kota Bogor masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam efektivitas komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Kolaborasi yang lemah antara pemerintah Kota Bogor, swasta, dan masyarakat sering kali menghambat implementasi program pengelolaan sampah yang optimal. Ketidakjelasan peran

masing-masing pihak menyebabkan kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan strategi, seperti pengadaan fasilitas pemilahan sampah, sarana dan prasarana pengangkutan, dan inovasi pengolahan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika kolaborasi *stakeholder* yang terlibat serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat menjalin kolaborasi antar *stakeholder* untuk mewujudkan penanganan sampah yang berkelanjutan dan lebih efektif di masa mendatang. Merujuk pada pemaparan di atas, maka rumusan penelitian yang akan dieksplorasi dalam skripsi ini adalah mengapa dinamika kolaborasi antar aktor dalam penanganan sampah di Kota Bogor tidak berjalan dengan optimal, sehingga timbulan sampah tidak tertangani dengan optimal.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat di Kota Bogor menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan.
- 2) Kota Bogor tidak memiliki TPA yang memadai di wilayahnya, sehingga bergantung pada TPA Galuga di Kabupaten Bogor, yang seringkali mendapat penolakan dari masyarakat sekitar TPA Galuga
- 3) Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sering kali tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan tumpang tindih tugas dan kurangnya sinergi dalam program pengelolaan sampah.

- 4) Dinamika kolaborasi antara pemerintah Kota Bogor, swasta, dan masyarakat dalam penanganan sampah yang belum optimal dalam penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dinamika kolaborasi antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bogor?
- 2) Apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah, kelompok masyarakat, dan masyarakat dalam dinamika kolaborasi penanganan sampah di Kota Bogor?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis dinamika kolaborasi antara pemerintah Kota Bogor, swasta, dan masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Bogor.
- 2) Menganalisis faktor penghambat dan pendorong dinamika kolaborasi dan dampaknya terhadap penanganan sampah di Kota Bogor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat suatu penelitian berperan sebagai indikator pencapaian tujuan penelitian. Dengan meninjau latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang administrasi publik. Hal ini juga membantu peneliti lain dalam membandingkan, karena penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mereka tentang teori dan metodologi penelitian.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai sumber informasi kepada masyarakat mengenai kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Bogor.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses penanganan sampah yang ada di Kota Bogor. Serta dapat membentuk mekanisme koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji berfokus pada *Collaboratiff Governance*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam mengurangi penggunaan plastik. Penelitian ini mengidentifikasi adanya model governansi kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang

lebih bersih dan sehat. Meskipun kolaborasi sudah terjalin, penulis mencatat perlunya peningkatan kerjasama agar upaya pengurangan penggunaan plastik dapat lebih efektif. Hasil penelitian juga menekankan bahwa kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan merupakan kunci untuk mencapai tujuan pengurangan sampah plastik, serta mengatasi tantangan yang ada dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan (Wahyudin, 2023).

Penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan sampah di Kota Ambon menerapkan pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Meskipun telah dilakukan upaya signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat serta inisiatif Bank Sampah, masih terdapat tantangan utama, seperti keterbatasan tenaga kerja dan sarana prasarana yang memadai. Data menunjukkan adanya penurunan volume sampah, namun hasilnya masih belum optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya komitmen, koordinasi, dan transparansi dalam setiap tahapan kerja sama guna mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan peningkatan sumber daya serta dukungan yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Ambon dapat menjadi lebih efektif dan efisien (Zein, 2024).

Penelitian ini mengkaji kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat dalam mengelola sampah plastik di Kota Makassar. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini berhasil mengurangi

sampah plastik melalui berbagai inisiatif, termasuk kampanye edukasi, program bank sampah, dan regulasi pemerintah yang mendukung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan sampah plastik mencapai 16% pada tahun 2023 dan 15,03% pada tahun 2024. Kunci keberhasilan kolaborasi ini terletak pada koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Melalui dialog terbuka di antara seluruh pihak, kesadaran akan dampak buruk sampah plastik dapat ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan (Ade, 2024).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor telah menerapkan prinsip kolaboratif, namun belum optimal. Meskipun kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media yang dikenal sebagai model penta helix telah terbentuk, masih terdapat tantangan besar dalam mengurangi jumlah sampah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, seperti melalui Bank Sampah, sudah ada, praktik pengurangan sampah di tingkat rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Penelitian merekomendasikan penerapan model tata kelola kolaboratif yang lebih terintegrasi, dengan fokus pada tiga tahapan pengelolaan: skala rumah tangga, skala kawasan, dan skala perkotaan, untuk mencapai

pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor (Rizky, 2024).

Penelitian ini menyoroti strategi kolaboratif yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tulung Selapan pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola pabrik sampah, dan masyarakat telah membuahkan hasil yang positif menciptakan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah desa berperan sebagai penyedia fasilitas dan program, sementara pabrik sampah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan, termasuk pemisahan sampah berdasarkan jenis. Masyarakat juga dilibatkan sebagai pendukung, yang terlihat dari partisipasi mereka dalam membayar iuran untuk pengangkutan sampah. Program ini telah berjalan dengan baik, terbukti dari tersedianya fasilitas pengangkutan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, yang secara keseluruhan membantu mengatasi masalah sampah di desa tersebut (Mukus, 2023)

Penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan Bank Sampah di Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik menerapkan model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Studi ini menemukan bahwa kerja sama yang terstruktur ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah yang lebih efektif. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti kurangnya kepercayaan antara pemangku kepentingan dan rendahnya partisipasi publik masih menjadi hambatan. Proses

kolaboratif didukung oleh dialog tatap muka dan komitmen bersama, namun belum ada prosedur operasional yang jelas untuk semua pihak. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Bank Sampah bergantung pada kolaborasi yang efektif dan saling percaya antara semua pemangku kepentingan (Hertati, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa model kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun program KangPisMan telah diluncurkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dari sumbernya, partisipasi masyarakat dan peran pemangku kepentingan belum sepenuhnya optimal. Penelitian mengidentifikasi bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan media belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari masih besarnya jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Peneliti merekomendasikan model tata kelola kolaboratif yang dibagi menjadi tiga tahap: pengelolaan dari sumber, pengelolaan sampah skala regional, dan pengelolaan sampah skala kota. Dengan pendekatan ini, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat mengurangi dampak sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Bandung (Rini, 2020)

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Desa Paulan, Karanganyar, telah berhasil mengatasi berbagai permasalahan sampah melalui pendirian Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). Proses kerja sama ini diawali dengan koordinasi antara pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta serta masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti dialog langsung, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama sangat berpengaruh dalam menciptakan sinergi antar pihak. Melalui penerapan konsep Penta Helix, Desa Paulan berhasil mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang mencakup pembuatan bank sampah dan pemisahan sampah, serta konversi sampah menjadi pupuk cair. Keberhasilan ini tidak sebatas meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat lokal, tetapi menjadikan Desa Paulan sebagai model bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Dhimas, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam tata kelola pengelolaan sampah plastik di Bali telah berjalan dengan baik, namun partisipasi dan kepatuhan masyarakat masih kurang. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung dan beberapa inisiatif kolaboratif, tujuan bersama antar aktor belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran publik tentang dampak sampah plastik serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya mencakup seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencapai lingkungan laut yang bersih dari polusi plastik. Upaya sosialisasi yang lebih massif dan penguatan kerjasama antar pihak diperlukan agar tata kelola sampah plastik dapat lebih efektif dan berkelanjutan (Ain, 2021).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah terintegrasi di Kabupaten Gresik belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor pendorong yang teridentifikasi meliputi efektivitas figur formal, peran media massa, dan tindakan tegas dari aparat hukum. Meskipun pemerintah dan pemangku kepentingan telah melakukan berbagai strategi, kesadaran publik dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber, terutama sampah rumah tangga, masih rendah. Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan mencakup keterbatasan sumber pendanaan, kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan penolakan masyarakat terhadap pembukaan tempat pembuangan baru. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kolaborasi dan dukungan infrastruktur yang memadai guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan di Gresik (Hertati, 2022).

Kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan *literatur review* di atas adalah penelitian ini menekankan pada dinamika kolaborasi yang berarti akan mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara aktor pemerintah, masyarakat, dan kelompok masyarakat berubah seiring waktu, serta faktor penghambat yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan penelitian ini berfokus di Kota Bogor.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
1	Cecep Wahyudin, Oetje Subagja, dan Abu Bakar Iskandar / 2023	Menyusun model tata kelola kolaboratif yang berkontribusi terhadap upaya pengembangan strategi pengurangan penggunaan plastik.	Kualitatif	Adanya penerapan <i>collaborative governance</i> antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, efektivitas kolaborasi ini masih memerlukan peningkatan, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam upaya pengurangan penggunaan plastik.
2	Harry Mulya Zein, Syifa Jouhariah, dan Sisca Septiani / 2024	Melakukan evaluasi terhadap tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon dengan menitikberatkan pada aspek keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, serta kepemimpinan yang bersifat fasilitatif..	Kualitatif	Meskipun upaya kolaboratif telah dilakukan, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana masih ada. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Bank Sampah meningkatkan partisipasi, namun komitmen dan koordinasi perlu diperkuat untuk hasil yang lebih optimal.
3	Risan Agung Ade dan Andriansyah / 2024	Mengetahui kolaborasi lingkungan antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat	Kualitatif	Kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat telah menunjukkan keberhasilan dalam

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
		dalam mengurangi sampah plastik di Kota Makassar.		mengurangi sampah plastik. Melalui kampanye edukasi, program bank sampah, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, Kolaborasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik berkat koordinasi yang efektif antara pemerintah, LSM, dan masyarakat.
4	Sri Afnitawati, Alfian Prayoga, dan Asropi / 2024	Menggambarkan kolaborasi penta helix pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam mengurangi sampah dari sumber hingga tingkat perkotaan serta menganalisis model Collaborative Governance yang ideal untuk Kabupaten Bogor.	Kualitatif	Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah telah berjalan, namun belum optimal. Mengingat kompleksitas permasalahan, disarankan model tata kelola kolaboratif terpadu berbasis sumber daya yang ada, dengan tiga tahap: 1) skala rumah tangga, 2) skala kawasan (kecamatan), dan 3) skala perkotaan.
5	Primus Mukus, Amaliatulwalidain, dan Qur'anul Karim / 2023	Menganalisis strategi <i>Collaborative Governance</i>	Kualitatif	Program pengelolaan sampah berkelanjutan

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
		Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tulung Selapan pada 2022.		melibatkan kolaborasi pemerintah desa sebagai penyedia fasilitas, pabrik sampah sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai pendukung. Keberhasilan program ini tercermin dari tersedianya fasilitas seperti armada pengangkut sampah dan penerapan pemilahan sampah berdasarkan jenis.
6	Diana Hertati dan Lukman Arif / 2022	Penelitian ini mengkaji model tata kelola kolaboratif dalam mengelola bank sampah di Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.	Kualitatif	Tata kelola kolaboratif mengintegrasikan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola bank sampah, mempromosikan sirkulasi ekonomi melalui pengelolaan sampah untuk meningkatkan ekonomi lokal.
7	Jati Puspita Rini, Ely Sufianti, dan Sait Abdullah / 2020	Identifikasi model kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Bandung. Analisis tantangan dalam kolaborasi ini.	Kualitatif	Kolaborasi dan pembagian peran pemangku kepentingan belum efektif, dan tantangan dalam pengelolaan sampah tetap kompleks. Peneliti merekomendasikan Model Tata Kelola Kolaboratif yang

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
		Usulkan Model Tata Kelola Kolaboratif yang ideal untuk Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Bandung.		ideal untuk Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Bandung, yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia.
8	Ivan Dhimas, Sri Hastjarjo, dan Yulius Slamet / 2022	Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi, praktik komunikasi dalam pengelolaan sampah, dan penerapan konsep pentahelix dalam kerjasama pemangku kepentingan, serta menyoroti dampaknya terhadap kebijakan publik dan lingkungan di desa.	Kualitatif	Kolaborasi dimulai dengan koordinasi pemangku kepentingan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tata kelola seperti dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil antara. Model Kolaborasi Penta Helix terlihat jelas, membuktikan efektivitasnya dalam pengelolaan sampah di Badan Usaha Milik Desa TPS Tuntas.
9	K Q Ain, M A Nasri, M N Alamsyah, M D R Pratama, and T Kurniawan / 2021	Menganalisis bagaimana proses tata kelola kolaboratif berlangsung untuk lingkungan yang berkelanjutan	Kualitatif	Tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah plastik di Bali efektif, tetapi partisipasi masyarakat dan kepatuhan masih rendah akibat tidak adanya tujuan bersama. Volume besar sampah plastik di laut Bali disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dan

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
				rendahnya kesadaran publik.
10	Diana Hertati, Lukman Arif, dan Nurhadi / 2022	Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pengelolaan sampah terintegrasi.	Kualitatif	Memetakan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pengelolaan sampah terintegrasi. Temuan menunjukkan bahwa kondisi sistemik Pemerintah Kabupaten Gresik tidak secara proporsional menangani masalah pengelolaan sampah.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari tiga pilar utama dalam kehidupan bernegara, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu, bidang ini juga mencakup aspek yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, serta etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, administrasi publik meneliti cara pengelolaan organisasi sektor publik. Meskipun memiliki kesamaan dengan manajemen yang juga membahas organisasi, manajemen lebih berfokus pada perusahaan swasta, sedangkan administrasi publik menelaah organisasi pemerintahan, termasuk departemen dan dinas dari tingkat pusat hingga kecamatan. Pada intinya, administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu (Panjaitan & pardede, 2021).

Administrasi publik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Mempelajari bidang ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan tersebut serta mendorong implementasi kebijakan publik secara efektif dan efisien. Dalam pengembangannya, administrasi publik harus memperhitungkan berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau keberlangsungan suatu organisasi. Faktor eksternal, khususnya, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan administrasi publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Istilah "paradigma" berasal dari bahasa Yunani "paradeigma," yang berarti pola atau contoh. Para ilmuwan memiliki kesepakatan mengenai beberapa konsep terkait paradigma dalam pengembangan administrasi publik. Misalnya, Nicholas Henry memperbarui pandangan mengenai implementasi kebijakan sejak tahun 1975. Awalnya, terdapat empat model formatif ideal, namun akhirnya disimpulkan bahwa terdapat enam perubahan dalam paradigma administrasi publik yaitu sebagai berikut:

1. Dikotomi Politik

Administrasi, yang ada dari 1900 hingga 1926. Paradigma ini berfokus pada strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemisahan operasi pemerintahan dan politik. Woodrow Wilson menciptakan fondasi untuk cara berpikir ini Dalam esainya berjudul *The Study of Administration*, yang dipublikasikan pada tahun 1897 di *Political Science Quarterly* (Basheka, 2012), Woodrow Wilson mengemukakan empat persyaratan untuk menciptakan administrasi publik yang efektif: (1) pembagian politik dan administratif; (2) pemeriksaan perbandingan organisasi swasta dan politik; (3) peningkatan efisiensi melalui peningkatan praktik dan sikap bisnis terhadap operasional sehari-hari; dan (4) meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pelatihan pegawai negeri sipil dan manajemen dan mendorong evaluasi berbasis prestasi. Teori administrasi publik didasarkan pada paradigma ini. Lebih penting lagi, menurut Henry (2007), tujuan dari paradigma ini adalah

untuk memberikan pendekatan ilmiah dengan memisahkan antara "fakta" dan "nilai".

2. *The principles of administration atau Standard of Organization* (1927 – 1937)

mengevaluasi persyaratan organisasi. Paradigma ini dimulai dengan publikasi buku W. "Prinsip Administrasi Publik". Willoughby (Willoughby, 1927) Buku penting lainnya termasuk "Pengalaman Kreatif" karya Mary Parker Follett (Follett, 1924), "Manajemen Industri dan Umum" karya Henry Fayol (Fayol dan Coubrough, 1930), dan "Prinsip Organisasi" karya James D. Mooney dan Alan C. Setidaknya tujuh prinsip administrasi: perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Fokus utama dari paradigma kedua ini, menurut Lyndall et al., adalah prinsip administratif; mereka dipandang bisa digunakan dalam berbagai organisasi dan konteks sosial budaya.

3. *Public Administration as Political Science* (1950 – 1970)

Paradigma ketiga, "Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik" (1950–1970), sebagaimana dikemukakan oleh Henry (2007), menunjukkan upaya para ilmuwan politik untuk mengintegrasikan kembali administrasi publik ke dalam ilmu politik. Sementara itu, ilmuwan manajemen juga berusaha memasukkan administrasi publik ke dalam disiplin ilmu manajemen. Paradigma ini berupaya membangun kembali hubungan konseptual dalam administrasi, sehingga pada akhirnya

administrasi publik kembali dikaitkan dengan ilmu politik sebagai induknya.

4. *Public Administration as Management* (1956 – 1970)

Paradigma keempat, "administrasi publik sebagai manajemen" atau "administrasi publik sebagai manajemen", didirikan oleh Henry. Selama ini, para ilmuwan manajemen telah berhasil mengintegrasikan administrasi publik ke dalam ilmu manajemen. Dalam paradigma ketiga dan keempat, politik dan manajemen adalah dua bidang keilmuan yang bersaing untuk mendapatkan bagian keilmuan administrasi publik. Transformasi dan inovasi mengembalikan administrasi ke ilmu politik sebagai disiplin utamanya dalam konteks masyarakat dan budaya.

5. *Public Administration as Public Administration* (1970 – Sekarang)

Tahap "pemerintahan publik sebagai pemerintahan publik" menandai munculnya konsep "pemerintahan publik baru" (NPM), di mana administrasi publik diakui sebagai disiplin yang terpisah. Pada fase ini, fokus utama beralih ke hierarki, sementara birokrasi mulai mengadopsi pendekatan berbasis pasar dan prinsip manajemen sektor swasta. Pergeseran ini, sebagaimana diidentifikasi oleh Hendry, menandai transisi dari model administrasi publik tradisional ke NPM. Salah satu tantangan utama yang dihadapi NPM adalah ketidakefisienan sistem administrasi. Konsep ini menggabungkan teori ekonomi dengan metode manajemen sektor swasta, sehingga memperkenalkan pendekatan

berbasis bisnis. Dalam konteks ini, istilah "governance" digunakan untuk menggambarkan hubungan dalam model baru ini.

6. *Governance* (1990 – Sekarang)

Tata kelola adalah proses utama yang membedakan pemerintahan modern dari pemerintahan tradisional. Menurut Ikeanyibe (2016), sebagai bagian yang lebih umum dari proses politik, masyarakat dan kelompok sosial turut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik yang signifikan. Dalam tata kelola, keterlibatan sektor lain, baik yang bersifat profit maupun nonprofit, menjadi hal yang diperlukan untuk menyediakan layanan. Secara umum, tata kelola memerlukan penyediaan layanan kepada jaringan bisnis swasta, organisasi nirlaba, dan tingkat pemerintahan lainnya (desentralisasi atau pembagian fungsi dan kekuasaan) (Ewalt, 2001). Dalam pemerintahan, kemitraan merupakan hal penting untuk operasi pemerintah. Baik sektor publik maupun swasta, warga lokal, dan kelompok masyarakat semuanya terlibat dalam kolaborasi ini (Gibson, 2011).

Analisis dimensi kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat pada penelitian ini dari keenam paradigma tersebut masuk ke dalam paradigma yang keenam yaitu *governance*. Menurut Dwiyanto (2004) dalam (Darmanto, 2023), kepemimpinan memiliki beberapa dimensi penting, seperti berikut:

1. Dimensi kelembagaan

Governance merupakan sistem administrasi yang melibatkan berbagai entitas, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Kajian

mengenai *governance* berfokus pada partisipasi beragam organisasi dan individu dalam menjalankan berbagai aktivitas guna merespons permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, berkembang teori pemetaan stakeholder, yang berfungsi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

2. Dimensi nilai

Konsep dasar dalam penggunaan kekuasaan dikenal sebagai *governance*. Dalam penerapannya, penggunaan kekuasaan harus berlandaskan nilai-nilai yang lebih luas dan kompleks, tidak hanya terbatas pada efisiensi serta efektivitas, seperti yang ditekankan dalam gerakan administrasi negara baru. Beberapa nilai utama yang dijadikan tolok ukur dalam menilai praktik *governance* yang baik mencakup efisiensi, efektivitas, keadilan sosial, serta demokrasi.

3. Dimensi proses

Salah satu aspek dalam konsep tata kelola atau *governance* adalah menjelaskan bagaimana berbagai elemen dan institusi bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang muncul di lingkungan mereka. Tata kelola diterapkan sebagai mekanisme di mana para pemimpin dan perancang strategi dari berbagai organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, berkolaborasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, terdapat fondasi utama yang menopang kemampuan suatu negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang mencakup sektor pemerintahan,

masyarakat sipil (*civil society*), serta sektor bisnis atau pasar. Pendekatan tata kelola yang bertanggung jawab telah berkembang, menciptakan jaringan dan interaksi antara ketiga sektor tersebut melalui otoritas administratif, ekonomi, dan politik yang saling melengkapi. Kemitraan dan interaksi ini menjadi praktik yang umum terjadi dalam lingkungan yang memiliki pedoman yang jelas, partisipasi aktif, transparansi, serta kepercayaan antaraktor. Lebih lanjut, dimensi tata kelola ini menjadi dasar bagi teori kolaborasi *stakeholder*, yang bertujuan untuk memahami bagaimana proses kolaborasi berlangsung dan menjadikannya sebagai acuan dalam evaluasi kebijakan serta pengelolaan pemerintahan.

1.6.4 Manajemen Publik

Manajemen Publik merupakan studi interdisipliner yang meneliti aspek umum organisasi dengan mengintegrasikan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dengan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, keuangan, aset fisik, informasi, serta keterlibatan publik. Dalam Firdausijah (2023) Thomas Woodrow Wilson dalam bukunya "*The Study of Administration*" menetapkan empat prinsip dasar dalam studi Administrasi Publik yang masih berpengaruh hingga saat ini. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Pemerintahan sebagai konteks utama organisasi,
2. Fungsi eksekutif sebagai pusat perhatian,
3. Pengembangan administrasi melalui pencarian prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif

4. Metode perbandingan sebagai pendekatan dalam pengembangan ilmu administrasi publik .

Menurut Pollitt dan Bouckaert dalam Suaedi (2023), manajemen publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dengan cara yang efektif dan efisien, serta memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Tantangan yang dihadapi adalah menemukan keseimbangan antara efektivitas biaya dan kebutuhan untuk mempertahankan kualitas serta aksesibilitas layanan.

Bovens dalam Suaedi (2023) menyatakan bahwa manajer publik memiliki tanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga negara, pemimpin politik, dan lembaga atau organisasi di atasnya. Hal ini menuntut adanya transparansi dan kepatuhan terhadap standar perilaku dan kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Rice dalam Suaedi (2023), manajemen publik mencakup penyediaan layanan kepada populasi yang beragam dengan berbagai kebutuhan dan harapan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan layanan yang sensitif terhadap budaya sambil tetap mengedepankan kesetaraan dalam distribusi sumber daya.

1.6.5 Governance

Roderick Arthur William Rhodes mengemukakan bahwa pengaturan mencerminkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan dalam cakupan yang lebih luas. Perubahan ini dapat berupa proses pemerintahan yang baru,

modifikasi dalam aturan yang mengatur, atau metode baru dalam mengelola masyarakat (Rhodes, 1996 dalam Astuti, 2020). Peralihan dalam pelaksanaan kebijakan publik tidak lagi hanya berpusat pada pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini dikenal sebagai *governance*. Hanberger (2004) dalam Astuti (2020) membagi model karakteristik tata kelola pemerintahan atau administrasi publik ke dalam tiga kategori, yaitu: pertama, model yang dikoordinasikan oleh negara (*state-coordinated governance*); kedua, model yang dikelola oleh pemerintah daerah (*local government-coordinated governance*); dan ketiga, model yang melibatkan berbagai aktor dalam proses koordinasi.

Menurut UNDP (1997), *governance* merujuk pada pelaksanaan berbagai keputusan dalam aspek ekonomi, politik, dan administrasi dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan aktor di luar pemerintahan menandakan bahwa *governance* berperan sebagai mekanisme yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menegakkan hak dan kewajiban, serta memungkinkan kontribusi berbagai pihak dalam proses pembangunan. Pemahaman lebih lanjut mengenai *governance* dapat diperoleh melalui konsep-konsep yang dikemukakan oleh Rhodes dalam Danar (2022), yang menggambarkan dinamika interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Governance as the minimal state* Tata kelola pemerintahan perlu disusun dengan lebih ramping dalam hal struktur, tugas, pokok, dan fungsi agar

dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Upaya perampingan lembaga bertujuan untuk mengurangi beban anggaran serta menyeimbangkan neraca pendapatan dan pengeluaran. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan termasuk privatisasi dan pengurangan intensitas dinas sipil yang dianggap kurang bermanfaat.

- 2) *Governance as corporate governance* Tata kelola pemerintahan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan di sektor swasta. Ini berkaitan dengan penerapan prinsip adaptif di sektor publik, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur, integrasi dan transparansi informasi, kepemimpinan strategis, serta membangun hubungan eksternal yang lebih luas dengan komunitas dan pemangku kepentingan.
- 3) *Governance as the New Public Management (NPM)* Tata kelola pemerintahan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan di sektor swasta. Ini berkaitan dengan penerapan prinsip adaptif di sektor publik, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur, integrasi dan transparansi informasi, kepemimpinan strategis, serta membangun hubungan eksternal yang lebih luas dengan komunitas dan pemangku kepentingan.
- 4) *Governance as good governance* Tata kelola pemerintahan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan di sektor swasta. Ini berkaitan dengan penerapan prinsip adaptif di sektor publik, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur, integrasi dan

transparansi informasi, kepemimpinan strategis, serta membangun hubungan eksternal yang lebih luas dengan komunitas dan pemangku kepentingan.

- 5) *Governance as a socio-cybernetic system* Sistem sosial-sibernetika adalah penerapan pemikiran sistem untuk menganalisis fenomena sosial berdasarkan tingkat kompleksitas dan dinamika yang dihadapi. Para aktor dalam tata kelola memiliki hubungan kausalitas yang erat, di mana semua pihak saling berbagi sumber daya. Sumber daya ini mencakup aspek finansial, teknologi, informasi, dan risiko, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan.

1.6.6 Collaborative Governance

Collaborative governance adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program publik (Ansell dan Gash, 2008) dalam (Astuti, 2020).

Kebijakan dan masalah publik menjadi fokus utama dalam kerja sama pemerintahan. Institusi publik berupaya untuk mencapai konsensus di antara pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, tujuan, dan proses kolaborasi. *Governance* kolaboratif bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan Bingham dalam (Astuti, 2020), kolaborasi merujuk pada proses yang memfasilitasi dan

melibatkan berbagai organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh satu organisasi. Bardach dalam (Astuti, 2020) mendukung pandangan ini dengan mendefinisikan kolaborasi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh dua atau lebih institusi yang bekerja sama untuk meningkatkan "*public value*" daripada bertindak secara terpisah.

Menurut H. Brinton Milward dan Keith G. Provan dalam (Astuti, 2020), model governance kolaboratif dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: model self-governance, lead governance, dan network governance administrative (Milward dan Provan, 2006; Sudarmo, 2011).

1. *Model self-governance* menggambarkan suatu struktur di mana tidak ada entitas administratif yang dominan, melainkan semua pemangku kepentingan berpartisipasi dalam jaringan. Dalam model ini, manajemen dilakukan secara kolektif oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.
2. *Model lead organization* menunjukkan adanya entitas administratif yang berperan sebagai pemimpin, di mana manajer bertanggung jawab untuk mengelola jaringan dan berfungsi sebagai anggota atau penyedia layanan dalam kolaborasi tersebut.
3. Model network organisasi manajemen menggambarkan suatu struktur di mana tidak ada entitas administratif yang dominan, tetapi semua pemangku kepentingan berpartisipasi dalam jaringan. Model ini mengintegrasikan elemen-elemen dari model self-governance dan lead organization, menciptakan kolaborasi yang lebih fleksibel dan terkoordinasi di antara para pemangku kepentingan.

Dalam jurnal "*Collaborative Governance in Theory and Practice*," Ansell dan Gash mengembangkan sebuah model kolaborasi pemerintahan. Model ini mencakup empat variabel utama, yaitu: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif, yang dijelaskan sebagai hasil dari penelitian Ansell dan Gash dalam (Astuti, 2020).

1. Kondisi Awal

Sebelum proses kolaborasi dimulai, kondisi awal memengaruhi prosesnya; kondisi-kondisi tertentu dapat membantu atau hal ini menghambat kerja sama antara pemangku kepentingan serta antara lembaga dan organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat tiga variabel penting yang berperan di tahap ini, yaitu: ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan, pengalaman sebelumnya terkait kerja sama atau konflik di antara mereka, serta faktor-faktor pendorong dan penghalang yang menghambat kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan menyoroti aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting karena memberikan legitimasi bagi proses kerja sama. Aspek-aspek yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini meliputi aturan main untuk kolaborasi, pembentukan forum, kejelasan dalam aturan pelaksanaan, serta transparansi dalam proses pelaksanaan.

3. Kepemimpinan

Pada saat kolaborasi, konflik dan ketidakpercayaan antara pemangku kepentingan seringkali dapat muncul. Namun, mereka biasanya memiliki

minat yang tinggi untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan sebagai mediator. Untuk mencapai keberhasilan dalam kolaborasi, kepemimpinan yang kuat harus dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan, yang sangat penting. Kepemimpinan yang efektif biasanya muncul dari komunitas pemangku kepentingan itu sendiri

4. Proses Kolaboratif

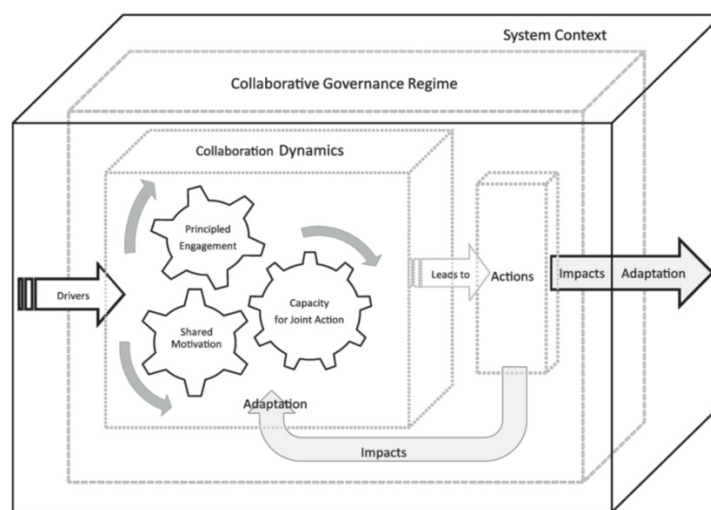
Collaborative governance dibangun melalui dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan, yang berfungsi sebagai proses untuk mencapai kesepakatan bersama dan mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan menekankan aspek saling menguntungkan. Dalam proses ini, membangun kepercayaan sangat penting dan tidak terpisahkan dari dialog, karena para pemimpin kolaborasi harus menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, yang merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan komitmen tinggi. Selain itu, adanya ketergantungan di antara pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi, di mana kolaborasi bukan hanya kesepakatan sekali tetapi merupakan proses kerjasama yang berkelanjutan. Pemahaman bersama tentang tujuan, definisi masalah, dan nilai yang ingin dicapai juga harus dikembangkan oleh para pemangku kepentingan. Terakhir, kolaborasi cenderung berlanjut jika hasil dari tujuan dan keuntungan dapat dirasakan, meskipun kecil, karena hasil kecil ini dapat berfungsi sebagai pendorong untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama.

Collaborative Governance, menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) dalam (Astuti, 2020), kolaborasi adalah metode dan struktur untuk mengelola serta membuat keputusan kebijakan yang secara konstruktif melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkatan, seperti lembaga publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan umum yang tidak dapat dicapai oleh satu kelompok saja. Karena ada ketergantungan antara aktor dan organisasi, kolaborasi mutlak diperlukan. Ketergantungan yang lebih besar, baik secara merata maupun dari perspektif grafik vertikal, menunjukkan kebutuhan kerja sama yang lebih besar. Diharapkan bahwa administrasi dapat membantu otoritas publik, wilayah rahasia, dan masyarakat saling memahami untuk mencapai hasil yang optimal. Ada banyak model tata kelola kolaboratif yang tersedia sebagai cara praktis untuk menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan. Salah satu contohnya adalah model Collaborative Governance Regime (CGR), yang dikembangkan oleh Stephan Balogh, Tina Nabatchi, dan Kirk Emerson. Model CGR dipandang sebagai model yang sederhana, tetapi itu memberikan analisis menyeluruh tentang proses kerja tim dari masukan hingga pemicu dampak. Kerangka CGR menggabungkan berbagai elemen tata kelola kolaboratif, mulai dari konteks sistem dan pendorong hingga kolaborasi dinamis, tindakan, dampak, dan adaptasi. Proses kolaborasi antar aktor yang terlibat, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus mengacu pada kolaborasi jangka panjang, menurut model CGR. Tiga komponen terdiri dari proses kolaborasi, menurut Emerson,

Nabatchi, dan Balogh (2012): (1) dinamika kolaborasi; (2) tindakan kolaborasi; dan (3) dampak.

1.6.7 Dinamika Kolaboratif

Gambar 1. 2 Bentuk Collaborative Governance Menurut (Emerson, Nabatchi, dan Balogh)



Sumber : (Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, 2020)

Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (Astuti, 2020) menguraikan bahwa proses kolaborasi terdiri dari tiga elemen utama: (1) dinamika kolaborasi, (2) tindakan bersama, dan (3) dampak serta penyesuaian dalam proses kolaborasi.

1. Dinamika Kolaborasi, hal ini merupakan aspek paling krusial dalam kolaborasi. Keberhasilan pelaksanaan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh dinamika yang meliputi penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama:

a. Penggerakan Prinsip Bersama: Ini melibatkan diskusi, baik secara langsung maupun melalui teknologi, untuk memperkuat tujuan bersama dan mengembangkan prinsip-prinsip yang diakui oleh semua aktor. Komponen dalam penggerakan prinsip bersama meliputi:

- Pengungkapan: Proses ini melibatkan identifikasi kepentingan dan nilai-nilai masing-masing aktor serta upaya membangun kepentingan bersama.
- Deliberasi: Terbentuk melalui diskusi terbuka yang memungkinkan semua aktor untuk menyampaikan pendapat dan ketidaksetujuan, menciptakan kualitas deliberasi yang baik.
- Determinasi: Ini berkaitan dengan penetapan tujuan kolaborasi, yang terbagi menjadi determinasi primer (keputusan prosedural) dan determinasi substantif (kesepakatan bersama).

b. Motivasi Bersama, hal ini menciptakan siklus positif yang melibatkan kepercayaan, pemahaman, legitimasi internal, dan komitmen. Komponen dari motivasi bersama meliputi:

- Kepercayaan Bersama: Dibangun melalui interaksi yang terus-menerus dan pengalaman kolaborasi sebelumnya.

- **Pemahaman Bersama:** Mencakup pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan di antara aktor, yang memperkuat interaksi interpersonal.
 - **Legitimasi Internal:** ini adalah pengakuan dalam kolaborasi bahwa para aktor dapat diandalkan dalam melaksanakan peran mereka.
- c. **Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama:** Ini mencakup hasil dari elemen yang melibatkan berbagai fungsi yang memungkinkan tindakan yang efektif, termasuk:
- **Prosedur dan Kesepakatan Bersama:** Aturan dan protokol yang diperlukan untuk kolaborasi, yang harus diatur dalam kesepakatan formal, terutama dalam kolaborasi yang kompleks.
 - **Kepemimpinan:** Pemimpin memainkan peran penting dalam mengorganisir kolaborasi, mulai dari menggalang dukungan hingga menginisiasi pertemuan dan mendistribusikan pengetahuan.
 - **Pengetahuan:** Informasi yang relevan bagi aktor untuk berpartisipasi, yang perlu didistribusikan dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan.
 - **Sumber Daya:** Termasuk pendanaan, waktu, dukungan teknis, dan keahlian yang diperlukan untuk kelancaran kolaborasi.

2. Tindakan Kolaborasi, Tindakan amat bervariasi dan mencerminkan dinamika yang ada. Semua aktivitas, baik itu kegiatan, acara, atau diskusi, dapat dievaluasi berdasarkan pengembangan dan pemahaman yang tepat tentang dinamika kolaborasi melibatkan semua aktor dan individu yang terlibat. Hasil dari tindakan ini dapat menghasilkan dampak sementara yang memengaruhi kembali dinamika kolaborasi, serta memberikan efek jangka panjang.
3. Dampak dan Adaptasi, Efek sementara muncul selama proses kolaborasi, dengan karakteristik dampak yang mencakup hasil yang diharapkan, tidak diharapkan, dan tidak terduga. Dampak yang diharapkan, atau 'small-wins,' adalah hasil positif yang berkelanjutan yang memotivasi aktor. Sementara itu, dampak yang tidak diharapkan dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kolaborasi, dan dampak yang tidak terduga bisa muncul baik secara langsung maupun tidak. Berbagai dampak ini memberikan umpan balik yang diadaptasi dalam kolaborasi, mencerminkan respons terhadap masukan dari setiap aktor. Adaptasi yang efektif harus diterima semua pihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan organisasi yang lebih besar, untuk mencegah penyalahgunaan kolaborasi demi keuntungan organisasi. Adaptasi perlu berfokus pada kebutuhan utama yang harus diubah untuk menjaga kemajuan yang dicapai.

1.6.8 Faktor Pendorong dan Penghambat *Collaboratiff Governance* Penanganan Sampah Di Kota Bogor

Menurut pemerintah Kanada, ada sejumlah faktor yang dapat menghalangi kolaborasi dan partisipasi meliputi faktor budaya, institusi, dan politik (Government of Canada, 2008) dalam (Astuti, 2020) yaitu :

1. Faktor budaya

Kolaborasi dapat terhambat oleh budaya yang kaku dan ketidakberanian untuk mengambil risiko atau inovasi. Agar kolaborasi berjalan efektif, pelayan publik dan pemimpin perlu memiliki keterampilan serta komitmen untuk bekerjasama secara pragmatik dan berorientasi pada hasil. Meskipun kolaborasi dapat mengabaikan konvensi, dalam pelayanan publik yang terikat pada prosedur dan enggan mengambil risiko, hal tersebut menjadi sulit untuk diwujudkan.

2. Faktor Institusi

Kolaborasi dapat terjadi karena institusi yang terlibat, terutama pemerintah, cenderung menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi lainnya. Struktur yang terlalu ketat, seperti akuntabilitas keuangan dan kebijakan yang bersifat vertikal, tidak mendukung kolaborasi, yang justru muncul dari kecenderungan ini. Meskipun pemerintah mengadopsi sistem demokrasi, biasanya dalam bentuk demokrasi representatif, tidak selalu cocok untuk bekerja sama. Ini karena demokrasi membutuhkan lebih banyak proses dan formalitas daripada kemitraan horizontal.

3. Faktor Publik

Kolaborasi dapat terhambat jika pemimpin tidak inovatif dalam menghadapi tujuan politik yang kompleks dan bertentangan. Ketidakmampuan pemimpin kelompok kolaboratif untuk berinovasi dapat menghalangi kemajuan. Kepemimpinan yang inovatif adalah pemimpin yang memperkenalkan prinsip dan tujuan yang menjadi inti pemerintahan kolaboratif, menginspirasi agenda yang ditetapkan, dan mengarahkan pencapaian hasil yang baik.

Faktor keberhasilan kolaborasi menjadi salah satu kunci penting dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya dan penyelesaian masalah sosial. Menurut Mattessich dan Monsey (1992) dalam (Astuti, 2020). Terdapat enam fenomena yang berkontribusi terhadap efektivitas kolaborasi antar aktor. Fenomena ini mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk menciptakan sinergi yang positif dan produktif dalam kolaborasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil dan dampak kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

1. Lingkungan (*environment*)
 - a. Sejarah kolaborasi
 - b. Pemimpin yang kolaboratif
 - c. Iklim politik
2. Keanggotaan (*membership*)
 - a. Saling menghormati

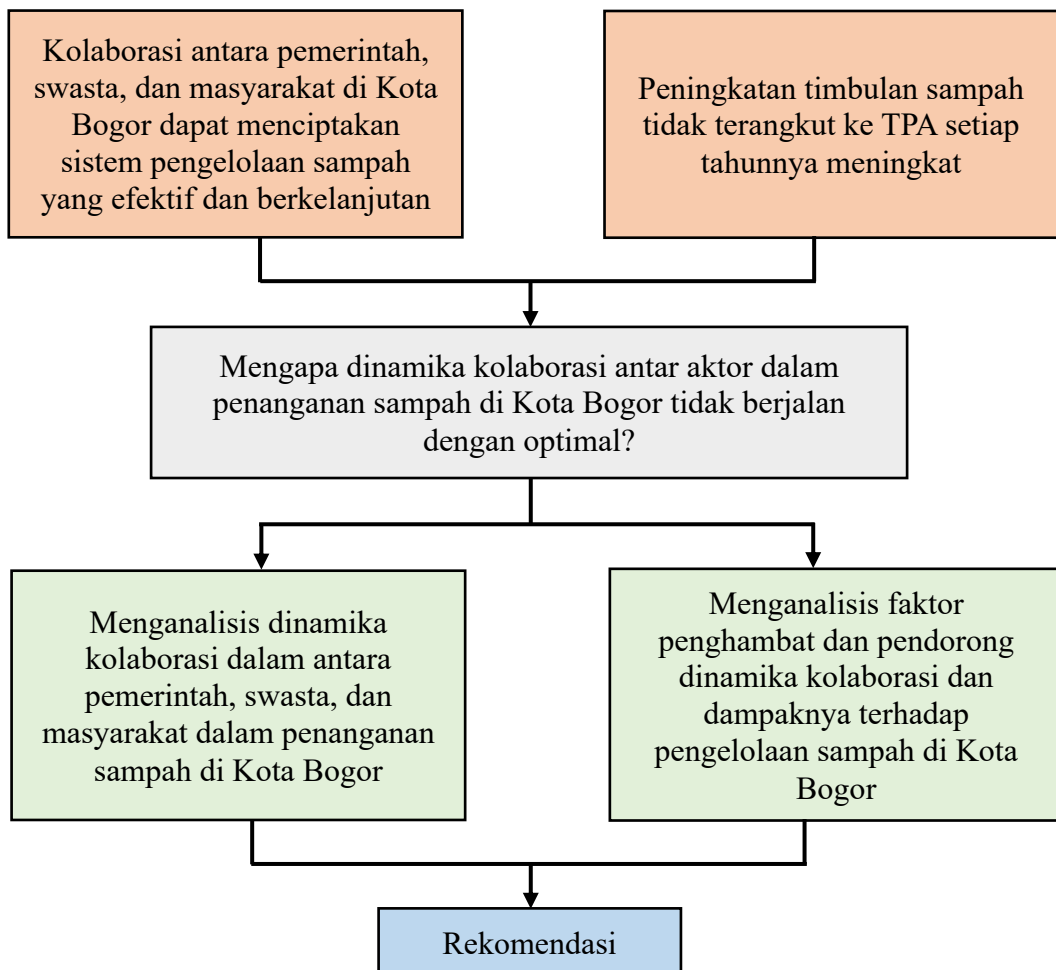
- b. Anggota yang sesuai
 - c. Kepentingan pribadi
 - d. Kemampuan untuk berkompromi
- 3. Proses/Struktur (*process/structure*)
 - a. Kepemilikan bersama
 - b. Pengambilan keputusan di berbagai tingkatan
 - c. Fleksibilitas
 - d. Pengembangan aturan dan pedoman kebijakan yang jelas
- 4. Komunikasi (*communication*)
 - a. Komunikasi terbuka dan frekuensi yang memadai
 - b. Membangun jaringan komunikasi formal dan informal
- 5. Tujuan (*purpose*)
 - a. Tujuan dan sasaran yang jelas serta dapat dicapai
 - b. Visi bersama
 - c. Tujuan yang spesifik
- 6. Sumber daya
 - a. Pembiayaan yang memadai
 - b. Pengumpulan tenaga kerja yang terampil

Kolaborasi dalam penanganan sampah di Kota Bogor didorong oleh beberapa faktor utama yang mencakup lingkungan pendukung, keanggotaan, proses dan struktur, komunikasi, tujuan, serta sumber daya. Lingkungan yang mendukung, seperti sejarah kerja sama yang baik, pemimpin kolaboratif, dan

iklim politik kondusif, menciptakan suasana sinergi yang positif. Keanggotaan yang menghargai keberagaman dan melibatkan individu yang tepat membantu membangun kepercayaan dan kemampuan kompromi untuk mengatasi perbedaan. Dalam hal proses, kepemilikan bersama atas hasil, fleksibilitas pengambilan keputusan, serta aturan yang jelas mendukung implementasi kolaborasi. Komunikasi terbuka dan interaksi yang intensif mempermudah aliran informasi, sedangkan tujuan yang jelas dan visi bersama memberikan arah yang solid. Selain itu, sumber daya yang terpenuhi, baik dana maupun tenaga kerja terampil menjadi elemen penting dalam keberhasilan kolaborasi.

Faktor penghambat muncul dari budaya, institusi, dan publik. Budaya birokrasi yang kaku, kurangnya keberanian mengambil risiko, dan minimnya keterampilan kolaborasi di kalangan pemimpin publik menjadi kendala. Struktur hierarkis institusi pemerintah sering kali tidak mendukung kolaborasi karena lebih mengutamakan akuntabilitas vertikal dan formalitas. Faktor publik, kurangnya inovasi dari pemimpin dalam menghadapi tujuan politik yang kompleks juga menghalangi kemitraan yang efektif. Oleh karena itu, memahami faktor pendukung dan penghambat ini sangat penting untuk merancang strategi kolaborasi penanganan sampah yang lebih responsif dan efektif di Kota Bogor.

1.7 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 5 Fenomena Penelitian

Fokus Penelitian	Fenomena	Sub Fenomena
Dinamika Kolaboratif	Pergerakan Prinsip Bersama	1. Pengungkapan 2. Deliberasi 3. Determinasi
	Motivasi bersama	1. Kepercayaan Bersama 2. Pemahaman Bersama 3. Legitimasi Internal
	Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama	1. Prosedur dan Kesepakatan Bersama 2. Kepemimpinan 3. Pengetahuan 4. Sumber Daya
Faktor Penghambat dan Pendorong Dinamika Kolaborasi	Faktor Budaya	1. Partisipasi Kelompok Kepentingan 2. Budaya Ketergantungan Pada Prosedur
	Faktor Institusi	1. Penerapan struktur Hierarkis Terhadap Institusi Yang Terlibat 2. Akuntabilitas Institusi Publik
	Faktor Sumber Daya	1. Tenaga Terampil Yang Disatukan 2. Pembiayaan Yang Memadai
	Faktor Lingkungan	1. Sejarah Kolaborasi 2. Kesadaran Masyarakat

Sumber : Jurnal diolah peneliti (2025)

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, menyelidiki objek dalam kondisi alami. Metode ini mengadopsi pendekatan eksperimen, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sampel data dikumpulkan secara purposive dan *snowball*, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), serta melakukan analisis data secara induktif atau kualitatif (Sugiono, 2016). Sesuai dengan definisi Sugiyono, metode penelitian kualitatif muncul akibat pergeseran paradigma mengenai realitas, fenomena, atau gejala

Data yang mendalam dan signifikan dapat diperoleh melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman makna dibandingkan dengan generalisasi karena makna adalah data nyata yang memiliki nilai di balik data tampak. Dalam penelitian kualitatif, generalisasi disebut *transferability*. Ini berarti hasil penelitian dapat diterapkan di lokasi lain dengan karakteristik yang sama. Penelitian ini melakukan pendekatan dengan pendekatan kualitatif. Dalam bahasa Inggris, penelitian didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks, mendalam, dan menyeluruh mengenai subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif, menurut Denzin & Lincoln (Setiawan, 2018), adalah jenis penelitian yang berasal dari latar belakang alami dan bertujuan untuk menjelaskan atau memahami fakta yang terjadi, bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri berikut:

1. Penelitian kualitatif berfokus terhadap proses dan produk;
2. Tanggal berasal dari peristiwa alami dan merupakan sumber utama dari tanggal;
3. Proses dan produk harus diperhatikan;
4. Analisis datanya cenderung induktif;
5. Fokus utama penelitian adalah hal-hal yang logis.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan tempat atau objek di mana suatu penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian terletak di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, yang beralamat di Jl. Paledang No. 43, RT. 01/RW. 02, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122. Lokasi penelitian dipilih untuk memperoleh data primer. Alasan memilih Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai lokus dari penelitian ini yaitu karena mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika kolaborasi dalam penanganan sampah di Kota Bogor.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada sebuah riset, penentuan subjek riset memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan dan memastikan kualitas isi riset. Hal ini dikarenakan subjek riset merupakan sumber utama dari riset yaitu pihak yang memiliki informasi mengenai variabel-variabel yang diteliti (Saputra, 2022). Jika data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti tidak sesuai dengan kondisi

subjek, maka validitas riset tersebut menjadi rendah dan kualitasnya tidak dapat diandalkan. Dalam riset sosial, terutama dibidang pendidikan dan kesehatan, subjek riset yang sering digunakan adalah siswa, guru, dan masyarakat umum. Sementara itu, dalam riset psikologi yang bersifat eksperimental, subjek riset dapat berupa manusia maupun hewan.

Peneliti membutuhkan sejumlah informan sehingga melibatkan semua pihak yang berperan dalam kolaborasi pencegahan stunting Kota Bogor dengan informan utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, serta menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh informan lain. Teknik *snowball sampling* melibatkan pengambilan sampel dengan bantuan informan kunci, yang kemudian akan mengembangkan sampel berdasarkan arahan yang diberikan oleh informan utama. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau naturalistic, yang mengarah pada pengumpulan data yang terjadi secara alamiah melalui observasi. Pemilihan desain penelitian ini disebabkan oleh kolaborasi penanganan sampah di Kota Bogor. Subjek penelitian atau informan merujuk kepada individu atau kelompok yang akan memberikan keterangan terkait fakta atau pandangan pribadi. Penentuan subjek penelitian ini harus relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian ini melibatkan subjek yang terkait dengan isu kolaborasi sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, desain penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data berbentuk deskriptif dalam bentuk naratif atau lisan, tanpa menggunakan angka atau statistic. Adapun subjek dalam penelitian ini antara lain :

- Analis Lingkungan Hidup Kota Bogor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- Subkoordinator Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- Ketua Bank Sampah Siliwangi.
- Produksi Bank Sampah Siliwangi.
- Manajemen dan Bendahara TPST 3R Mutiara Bogor Raya.
- Masyarakat Kota Bogor.
- Divisi Kebersihan Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan. Observasi menghasilkan data berupa benda, gerakan, atau proses yang dijelaskan dengan kata-kata. Jika menggunakan dokumentasi, dokumen tersebut menjadi sumber data. Sumber data dikelompokkan menjadi tiga kategori: orang, tempat, dan simbol. Sumber data juga dapat dilihat dari asalnya, yaitu populasi, sampel, dan informan khusus (Barlian, 2016). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut.

- a. Data Primer, Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian berupa jawaban terhadap pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang dipilih mengenai kolaborasi penanganan sampah di Kota Bogor.
- b. Data Sekunder, jenis data yang dikumpulkan secara tidak langsung, biasanya melalui pihak ketiga atau analisis dokumen sebelumnya. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa literatur, artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang umumnya tersedia untuk publik. Hal ini biasanya termasuk dalam data dari studi pustaka, yang mencakup buku, dokumen pendukung lainnya, dan pengumpulan informasi dari internet.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan efisien. Metode pengumpulan data merujuk pada teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen dan pengumpul data. Berikut adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan kondisi atau perilaku objek yang diteliti.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana responden dijawab dan berkomunikasi secara langsung dengan pewawancara. Interaksi antara

pewawancara dan responden berlangsung selama wawancara, yang dibagi menjadi pertemuan tidak terstruktur dan wawancara terorganisir.

3. Data atau informasi dari dokumentasi lapangan dapat berfungsi sebagai verifikasi keabsahan data. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta meningkatkan akurasi dan kebenaran informasi. Analisis dokumentasi mengumpulkan data dari arsip dan dokumen terkait penelitian, baik di dalam maupun di luar lokasi penelitian

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian, analisis data berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data melalui tiga tahap model AIR (*Auditory, Intellectually, and Repetition*) penurunan informasi spesifik, penyajian informasi, dan pemeriksaan. Aspek analisis data kualitatif meliputi pengorganisasian data ke dalam unit yang dapat dikelola, pencarian pola, penentuan informasi penting, serta keputusan tentang apa yang dapat dibagikan. Menganalisis data lapangan melibatkan pengkategorian, pemecahan data menjadi unit-unit, serta penarikan kesimpulan yang dapat dipahami. Berikut adalah tahapan pembuatan data kualitatif:

1. Proses pengumpulan data secara spesifik.
2. Pengubahan informasi, khususnya proses pembersihan informasi, dan itu berarti memeriksa kembali tanggapan untuk memeriksa apakah tanggapan tersebut benar.

3. Reduksi informasi, yaitu informasi yang disederhanakan, dikurangi, dibersihkan, diorganisasikan, dan dihilangkan yang tidak berdasar.
4. Penyajian data, yaitu menyajikan data dengan menggunakan bahasa deskriptif.
5. Pemeriksaan informasi, khususnya evaluasi ulang redundansi informasi.
6. Data kesimpulan, disebut juga rumusan kesimpulan umum dan khusus dari hasil penelitian yang disajikan.

1.9.7 Kualitas dan Validitas Data

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa triangulasi proses memeriksa data dari berbagai sumber dengan metode dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, dua cara digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang data, yaitu:

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber (informan) yang beragam.
2. Triangulasi teknik, dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.

Dalam menentukan kualitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik karena pada penelitian terkait kolaborasi penanganan sampah di Kota Bogor diperlukan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda agar mendapatkan data yang akurat dan kredibel sehingga dibutuhkan informan yang beragam agar hasil data yang didapatkan tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan dari berbagai macam sudut pandang serta peneliti perlu memadukan berbagai teknik seperti

wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang didapat terjamin kualitas dan kredibilitasnya.